

Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Volume 1 No 1 Tahun 2019

PERANAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO)

Hesty Juniar Rukmin¹ Ansyarif Khalid² Samsul Rizal³

Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
(hestyjuniarrukmin@gmail.com)

Abstrack

This study aims to determine the Role of Management Control Systems in Procurement of Government Goods and Services in the Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto. The type of data used in this study is qualitative data. Data collection techniques in this study are interviews, literature studies, and documentation. Data analysis method used in this research is Qualitative Descriptive. The results showed that the role of the management control system in the procurement of goods and services at the Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto was good because the control system had the role of forming committees, implementing, monitoring and supervising the procurement of goods and services at the Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.

Keywords: *Management Control Systems, Procurement of Government Goods and Services.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Sistem Pengendalian Manajemen pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan sistem pengendalian manajemen pada pengadaan barang dan jasa di Kantor Dinas Kesehatan Jeneponto cukup baik karena sistem pengendalian berperan membentuk kepanitiaan, melaksanakan, memonitoring dan mengawasi jalannya kegiatan pengadaan barang dan jasa di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Manajemen, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sangat penting dalam pemerintah dan dalam hidupnya Negara ialah semangat para penyelenggara Negara dan pemimpin. Penyelenggaraan Negara termasuk salah satunya pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk pembangunan Negara. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, diantaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan infrastruktur, telekomunikasi, dan lain-lain. Di samping itu, jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah tidaklah sedikit.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Organisasi Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Milik Daerah merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang rawan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya, yakni Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak manajemen yang ada dalam instansi pemerintah. Indonesia Corruption Watch mencatat sudah ada 84 kasus korupsi yang diproses hukum sepanjang tahun 2017 dengan kerugian Negara mencapai Rp 1,02 Triliun. Lembaga terbanyak yang menjadi sasaran korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan kasus sebanyak 222 dengan kerugian Negara mencapai Rp 1,17 Triliun.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah seperti pengadaan barang dan jasa belum berkurang secara signifikan. Kelemahan peranan dari sistem pengendalian manajemen yang juga sebagai pemantau akan mengakibatkan mudahnya terjadi kecurangan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di

instansi pemerintah. Padahal peran Sistem Pengendalian Manajemen sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan pengadaan barang dan jasa dalam instansi pemerintahan maupun perusahaan. Berdasarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Peranan Sistem pengendalian Manajemen pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto?

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Menurut Utarman (2012:13) "Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian tujuan utama". Menurut Mustakini (2009:34) "Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa Sistem adalah kumpulan dan perangkat yang berhubungan satu sama lain dan bekerja sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan sasaran tertentu untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Menurut Mulyadi (2007:89) pengendalian merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. Sedangkan menurut Indra Bastian pengendalian merupakan tahap penentu keberhasilan manajemen. Dessler dan Darma (2009: 62) mengemukakan bahwa pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi resiko. Menurut Hasibuan (2008: 39) mendefinisikan pengendalian merupakan suatu proses penjaminan di mana perusahaan dan orang-orang yang berada dalam perusahaan tersebut bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan, evaluasi yang dilakukan oleh atasan sebagai bentuk menghindari resiko dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Istilah *controlling* sering diterjemahkan dengan kata pengendalian dan pengawasan. Kedua istilah ini sering kali penggunaannya dipertukarkan terutama di lingkungan dunia usaha. Dalam akuntansi, pengendalian didefinisikan sebagai

hubungan antara prosedur dan sistem yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Mulyono, MA (2008: 8) mengatakan Manajemen diartikan sebagai seni dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran kinerja. Jadi, fungsi manajemen meliputi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Menurut T. Hani Handoko (2015: 10) Manajemen didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Dapat disimpulkan bahwa Manajemen adalah suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai komponen yang secara keseluruhan saling berkaitan dan terorganisir dalam rangkaian mencapai tujuan tertentu.

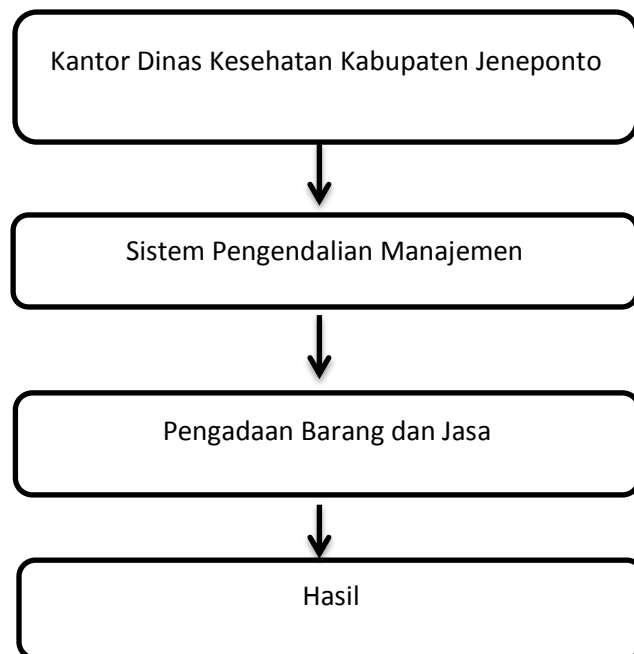
Sistem Pengendalian Manajemen didefinisikan sebagai sistem untuk menyampaikan informasi yang berguna dengan nilai kinerja para manajer serta pengambilan keputusan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan perusahaan (Peljhan dan Tekavcic, 2008). Secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan oleh para manajer untuk mengarahkan anggota organisasi agar melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai strategik pokok yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Aktivitas sistem pengendalian manajemen meliputi aktivitas untuk merencanakan, mengendalikan dan mengarahkan operasi organisasi sesuai rencana dan tujuan perusahaan. Jadi, sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strategiknya secara efektif dan efisien melalui para manajernya.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesungguhnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bagi pemerintah, ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu saja pelaksanaan tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan mencapai hasil yang maksimal, Abu Sopian

(2014:1). Pengadaan barang dan jasa pemerintah merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian lembaga perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa para pihak yang terkait harus memahami berbagai pengertian pokok yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, Abu Sopian (2014:75). Dasar-dasar pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode pengadaan barang/jasa dan metode pemilihan pengadaan barang atau jasa. Berikut adalah bagan kerangka pikir

Bagan 2.1
Kerangka Pikir



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto yang beralamat di Jl.Kesehatan No. 8 Bonto Sunggu Kota Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan yaitu bulan Juni-agustus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu penjelasan dari pimpinan dan pihak-pihak lain dalam perusahaan yang berkaitan dengan tujuan penulisan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah berupa Data Primer. Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari hasil pengamatan langsung serta hasil wawancara yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif.

Definisi Operasional

1. Sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan oleh para manajer untuk mengarahkan anggota organisasi agar melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien sesuai strategik pokok yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
2. Pengadaan barang dan jasa secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinas Kesehatan Daerah Kab. Keneponto, merupakan unsur pemerintahan di Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebelumnya Dinas Kesehatan beralamat di Jl. Abd. Jalil Sikki no. 5 Romanga Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Akan tetapi pada tahun 2013 Dinas Kesehatan berpindah alamat di Jl. Kesehatan No. 8

Bonto Sunggu Kota Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT), antara lain Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Pos Persalinan Desa (Polindes). Kebijakan manajemen terkait sistem pengendalian manajemen di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto yaitu dengan memberikan atau mendelegasikan kewenangan kepada para Kepala Seksi, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian untuk mengendalikan bagiannya masing-masing. Pengawasan dan pengendaliannya dilakukan melalui pendelegasian kepada setiap Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian.

Selain itu instansi sudah menetapkan kebijakan tertulis mengenai kejujuran dan kedisiplinan bagi seluruh pegawai. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan kegiatan dalam instansi untuk menunjang kinerja para pegawai dalam setiap kegiatan. Pengendalian pelaksanaan barang dan jasa juga sangat penting dilakukan agar dalam pelaksanaan pengadaan dapat berjalan efektif, efisien dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu pengendalian pengadaan barang dan jasa di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto juga dilakukan agar dapat mendeteksi kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa. Berikut tabel pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto tahun 2016 dan 2017:

Tabel 5.1
Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto Tahun 2016

No	Tahun	Program Kegiatan	Total Dana (Rp)
1	2016	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.216.251.000
2	2016	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.296.982.502
3	2016	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	6.476.871.000

4	2016	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	23.252.632.000
Jumlah			36.242.736.502

Tabel 5.2

**Daftar Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
 Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto Tahun 2017**

No	Tahun	Program Kegiatan	Total Dana (Rp)
1	2017	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.216.251.000
2	2017	Program Peningkatan Disiplin dan Aparatur	49.000.000
3	2017	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.296.982.502
4	2017	Program Peningkatan Status Gizi Masyarakat	500.000.000
5	2017	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	6.476.871.000
6	2017	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	23.252.632.000
Jumlah			36.791.736.502

Sistem pengendalian manajemen dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bisa dikatakan sangat penting karena sistem pengendalian manajemen digunakan untuk membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kesesuaian kegiatan di lapangan dengan kontrak yang telah disepakati dan setiap bulannya diadakan evaluasi atas laporan kegiatan melalui rapat pertemuan/ koordinasi. Hal itu dilakukan

untuk mendeteksi kelemahan atau kekurangan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa.

Peran sistem pengendalian manajemen dalam instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam setiap perencanaan kegiatan yang ada dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto. Proses pengendalian manajemen Di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto rutin dilakukan setiap tahun untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada seluruh pejabat yang berwenang.
2. Pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto setelah dilakukan perencanaan kegiatan kemudian dibuatkan rencana anggaran kegiatan yang nantinya akan berbentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah perencanaan kegiatan dan penyusunan anggaran disetujui oleh kepala dinas dan telah dilakukan verifikasi atas kerja anggaran oleh tim penyusun.
4. Evaluasi kerja pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto rutin dilakukan setiap bulannya.

Peranan sistem pengendalian manajemen pada pengadaan barang dan jasa di Kantor Dinas Kesehatan Jeneponto sangat penting karena sistem pengendalian berperan membentuk kepanitiaan, melaksanakan, memonitoring dan mengawasi jalannya kegiatan pengadaan barang dan jasa di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.

Manfaat sistem pengendalian manajemen di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto yaitu setiap pegawai atau staf, juga pejabat struktural di dalam Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto menyadari kewajiban, tanggungjawab, tugas pokok dan fungsinya masing-masing, selain itu terlaksana program kegiatan dengan baik sehingga setiap kegiatan di Kantor Dinas Kesehatan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Prosedur Pengadaan barang dan jasa pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, jika anggaran diatas Rp. 200.000.000 maka prosesnya melalui Lelang elektronik, tapi jika anggaran dibawah Rp. 200.000.000 maka proses pengadaannya melalui penunjukan langsung atau PL.
2. Sistem pengendalian manajemen dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bisa dikatakan sangat penting karena sistem pengendalian manajemen digunakan untuk membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kesesuaian kegiatan di lapangan dengan kontrak yang telah disepakati dan setiap bulannya diadakan evaluasi atas laporan kegiatan melalui rapat pertemuan/ koordinasi.
3. Peranan sistem pengendalian manajemen pada pengadaan barang dan jasa di Kantor Dinas Kesehatan Jeneponto cukup baik karena sistem pengendalian berperan membentuk kepanitiaan, melaksanakan, memonitoring dan mengawasi jalannya kegiatan pengadaan barang dan jasa di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.
4. Manfaat sistem pengendalian manajemen di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto yaitu setiap pegawai menyadari tugas dan fungsinya masing-masing, selain itu terlaksana program kegiatan dengan baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu peranan sistem pengendalian manajemen pada pengadaan barang dan jasa di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto tidak hanya sampai pada pembentukan kepanitiaan kegiatan, melainkan sampai dengan mengawasi jalannya kegiatan, maka saran yang diberikan adalah agar instansi dapat mempertahankan dan meningkatkan peran sistem pengendalian manajemen pada pengadaan barang dan jasa sampai pada pengawasan jalannya kegiatan pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, T Hani. 2015. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
<http://hjtfruity.blogspot.co.id/2017/05/pengertian-pengendalian-menurut-para.html?m=1>
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mustakini, Jogianto Hartono. 2009. *Sistem Informasi Teknologi*. Yogyakarta, Andi Offset.
- Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah